

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pengelolaan pengadaan barang dan jasa memegang peran penting yang mendukung kelancaran pembangunan adalah proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan ini tidak hanya mencakup pembelian barang fisik, tetapi juga mencakup penyediaan layanan dan pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak pemerintah daerah mulai berinovasi dalam sistem pelaporan pengadaan barang dan jasa guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses tersebut. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang adalah penerapan aplikasi berbasis sistem informasi yang memfasilitasi proses pelaporan secara digital. Pelaporan berbasis sistem informasi ini bertujuan untuk mempermudah monitoring, mempercepat akses informasi, mengurangi potensi penyimpangan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan yang dilakukan pemerintah.

Penerapan sistem informasi dalam pelaporan pengadaan juga mendukung integrasi data antar unit kerja, sehingga mempermudah proses evaluasi dan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen maupun auditor internal dan eksternal. Dengan adanya pelaporan digital, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dan rentan terhadap keterlambatan serta human error dapat diminimalkan. Selain itu, sistem informasi memungkinkan adanya pelacakan dokumen secara real-time dan penyimpanan data yang lebih terstruktur, sehingga proses audit dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Efektivitas memiliki arti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati tujuan, berarti makin tinggi efektivitasnya, begitu pula sebaliknya (Agustina, 2020:36). Menurut Syam (2020), efektivitas adalah tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input. Hal ini berlaku untuk suatu perusahaan atau seseorang. Efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin mendekati tujuan, maka semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

Pengadaan Barang/Jasa adalah proses kegiatan untuk memperoleh barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengadaan ini dilakukan melalui mekanisme tertentu yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari segi kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan pengawasan serta pelaporan. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah secara efektif dan efisien, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui proses yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung arah digitalisasi birokrasi, salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Regulasi ini menegaskan pentingnya penerapan teknologi digital untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan terpercaya, termasuk dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

Dalam konteks ini, pelaporan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu aspek krusial yang harus ditransformasikan secara digital agar lebih adaptif terhadap kebutuhan instansi pemerintah, khususnya di tingkat daerah. Pelaporan pengadaan yang lambat, tidak akurat, dan tidak real-time dapat menghambat pengambilan keputusan, memperbesar peluang terjadinya kesalahan, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Nias, melalui Sekretariat Daerah, selama ini menggunakan sistem Aplikasi Monitoring Evaluasi (AMEL) untuk melakukan pelaporan pengadaan barang dan jasa. Aplikasi ini merupakan sistem terpusat berbasis nasional yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan pengadaan di berbagai instansi pemerintah. Namun, dalam praktiknya, sistem AMEL masih menghadapi sejumlah kendala signifikan, khususnya dalam menjawab kebutuhan lokal secara cepat dan fleksibel. Beberapa gejala permasalahan yang teridentifikasi di antaranya adalah keterlambatan penyajian data, rendahnya akurasi laporan, laporan yang disusun tidak rinci, serta ketidakmampuan sistem dalam menyediakan informasi secara real-time.

Permasalahan tersebut diperparah oleh sifat sistem AMEL yang terpusat, sehingga unit kerja di daerah memiliki keterbatasan dalam mengakses, mengolah, dan menyesuaikan data sesuai konteks dan urgensi lokal. Selain itu, proses koordinasi antarunit kerja dalam menyusun laporan menjadi memakan waktu dan rentan terjadi kesalahan input karena belum adanya validasi dan standarisasi yang ketat. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah, serta kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif sebagai dasar kebijakan.

Sebagai respon atas permasalahan tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Nias mulai mengembangkan dan menerapkan sistem pelaporan lokal berbasis digital yang lebih adaptif terhadap dinamika internal daerah, yaitu aplikasi SIMONIBARJAS (Sistem Monitoring dan Informasi Barang dan Jasa). Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi berbagai keterbatasan AMEL dengan menghadirkan fitur-fitur pelaporan yang lebih cepat, rinci, valid, dan tersedia

secara real-time. SIMONIBARJAS memfasilitasi pelacakan dokumen pengadaan, integrasi antarunit kerja secara langsung, serta akses data yang dapat dimonitor oleh pimpinan dan auditor tanpa menunggu proses rekapitulasi manual.

Tabel 1. 1

Perbandingan Sistem AMEL dan SIMONIBARJAS

Aspek	Sistem AMEL	Aplikasi SIMONIBARJAS
Sifat Sistem	Terpusat (Nasional)	Desentralisasi (Daerah)
Aksesibilitas	Terbatas untuk user lokal	Diakses langsung oleh unit kerja daerah
Responsivitas	Tidak fleksibel terhadap kebutuhan lokal	Responsif dan adaptif terhadap kebutuhan daerah
Penyajian Data	Umum dan lambat	Rinci dan real-time
Koordinasi	Bergantung pada input manual antarunit	Terintegrasi dan otomatis
Validasi & Standarisasi	Minim, berpotensi data error	Dilengkapi sistem validasi internal
Dukungan Keputusan	Kurang membantu pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan cepat	Memberikan data yang relevan untuk keputusan berbasis data aktual

Sumber diolah peneliti 2025

Melalui perbandingan ini, terlihat bahwa sistem SIMONIBARJAS hadir untuk mengisi celah kelemahan dalam pelaporan pengadaan barang dan jasa yang tidak mampu dijangkau oleh sistem AMEL. SIMONIBARJAS tidak dimaksudkan untuk menggantikan AMEL secara keseluruhan, namun sebagai sistem pelaporan internal yang lebih adaptif dan mendukung sistem nasional secara komplementer.

Urgensi penerapan sistem pelaporan berbasis lokal seperti SIMONIBARJAS terletak pada kebutuhan akan fleksibilitas, kecepatan, dan relevansi data dalam lingkungan kerja birokrasi daerah. Tidak semua informasi yang dibutuhkan pimpinan dapat menunggu proses pelaporan terpusat yang bersifat birokratis. Ketika pengambilan keputusan harus dilakukan secara cepat, data real-time dan detail sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, sistem pelaporan yang bersifat lokal namun terintegrasi, seperti SIMONIBARJAS, menjadi titik temu antara kebutuhan praktis lapangan dan arah kebijakan nasional digitalisasi pemerintahan. Lebih jauh, SIMONIBARJAS juga mendukung semangat reformasi birokrasi yang mendorong efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran. Dengan sistem ini, pelaporan dapat dilakukan lebih akurat, efisien dalam waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara digital mendukung pula prinsip-prinsip pengelolaan yang bebas dari korupsi dan kolusi.

Kantor Pengadaan Barang dan Jasa yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Unit ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap proses pengadaan sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya, pelaporan pengadaan barang dan jasa masih sering menghadapi berbagai kendala. Di Kabupaten Nias, selama ini pelaporan dilakukan melalui aplikasi Aplikasi Monitoring Evaluasi (AMEL) yang merupakan sistem berbasis pusat. Meskipun aplikasi ini telah menjadi acuan nasional, penggunaannya di tingkat daerah belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam mendukung kebutuhan informasi yang cepat, akurat, dan komprehensif. Permasalahan yang paling sering muncul adalah keterlambatan dan ketidaktepatan dalam penyajian data ketika pimpinan atau pemangku kepentingan membutuhkan informasi real-time. Untuk memperoleh laporan yang dibutuhkan, pihak Sekretariat Daerah harus melakukan koordinasi dengan berbagai unit kerja, yang memakan waktu dan kerap menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, akurasi data yang dikumpulkan juga masih menjadi

tantangan. Proses input data yang belum terstandarisasi dengan baik serta minimnya validasi menyebabkan laporan yang dihasilkan tidak mencerminkan kondisi lapangan secara tepat. Laporan monitoring yang dihasilkan pun cenderung umum dan kurang mendetail karena tidak dilengkapi dengan data yang cukup komprehensif. Kondisi tersebut membuat pimpinan kesulitan dalam membuat keputusan yang cepat dan tepat berbasis data.

Dalam upaya mendukung reformasi birokrasi dan modernisasi sistem pemerintahan, kantor ini menjadi ujung tombak dalam penerapan aplikasi SIMONIBARJAS. Aplikasi SIMONIBARJAS dirancang untuk menyediakan pelaporan yang lebih cepat, akurat, dan rinci, serta dapat diakses oleh para pengambil keputusan secara langsung dan real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan efektivitas pelaporan pengadaan barang dan jasa dapat meningkat sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.

Berikut adalah tabel yang merangkum masalah utama, penyebab, dan solusi yang ditawarkan berdasarkan latar belakang di atas.

Tabel 1. 2 Tabel Masalah dan Solusi

Aspek	Uraian
Masalah Utama	Belum efektifnya pelaporan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi AMEL di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.
Gejala Permasalahan	1. Keterlambatan penyajian data 2. Akurasi laporan rendah 3. Laporan umum dan tidak rinci 4. Informasi tidak real-time
Penyebab Permasalahan	1. Sistem AMEL bersifat terpusat 2. Koordinasi antar unit kerja memakan waktu 3. Minimnya validasi dan standarisasi input data

Dampak	1. Pengambilan keputusan menjadi lambat 2. Pimpinan kesulitan mendapatkan informasi akurat dan komprehensif
Solusi yang Ditawarkan	Penerapan aplikasi SIMONIBARJAS untuk mendukung pelaporan yang lebih cepat, akurat, rinci, dan real-time.
Harapan dari Solusi	Meningkatkan efektivitas pelaporan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias serta mendukung reformasi birokrasi.

Sumber olahan peneliti 2025

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti bahwa masalah utamanya adalah belum efektifnya pelaporan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi AMEL di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. Aplikasi yang digunakan saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan akan pelaporan yang cepat, akurat, dan rinci, sehingga tidak optimal dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Gejala dari permasalahan ini terlihat dari keterlambatan penyajian data, rendahnya akurasi laporan, laporan yang disusun cenderung umum dan tidak mendalam, serta ketidakmampuan sistem dalam menyediakan informasi secara real-time. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan belum berjalan secara maksimal. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sistem AMEL yang bersifat terpusat sehingga tidak fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan daerah, koordinasi antar unit kerja yang memakan waktu, serta kurangnya validasi dan standarisasi dalam input data. Ketiga hal ini berkontribusi terhadap rendahnya kualitas laporan yang dihasilkan. Dampaknya, pengambilan keputusan menjadi lambat karena data yang dibutuhkan tidak tersedia secara tepat waktu. Selain itu, pimpinan kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan atau tindakan.

Berikut adalah grafik yang menggambarkan berbagai permasalahan dalam pelaporan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi AMEL



Gambar 1. 1 GRAFIK AMEL

Grafik di atas menunjukkan perbedaan tingkat permasalahan yang dihadapi dalam pelaporan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi AMEL. Aspek-aspek yang ditampilkan meliputi keterlambatan penyajian data, rendahnya akurasi laporan, laporan yang tidak rinci, serta sistem yang tidak mendukung informasi secara real-time. Selain itu, grafik juga menggambarkan kendala sistemik seperti sistem yang bersifat terpusat, lambatnya koordinasi antar unit kerja, serta minimnya validasi dan standarisasi input data. Seluruh faktor ini berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan serta kesulitan pimpinan dalam memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti mengangkat judul: “Efektifitas Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Aplikasi Simonibarjas Kabupaten Nias Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, beberapa permasalahan utama yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi AMEL belum berjalan efektif.
2. Keterlambatan dalam penyajian data pelaporan.
3. Akurasi laporan yang rendah.
4. Laporan yang dihasilkan bersifat umum dan tidak rinci.
5. Sistem pelaporan belum mendukung informasi secara real-time.
6. Proses koordinasi antar unit kerja memakan waktu.
7. Validasi dan standarisasi input data masih minim.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan mendalam, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan pada lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.
2. Fokus penelitian adalah pada efektivitas pelaporan pengadaan barang dan jasa, bukan pada proses pengadaan secara keseluruhan.
3. Sistem yang menjadi objek evaluasi adalah aplikasi SIMONIBARJAS sebagai solusi dari permasalahan aplikasi AMEL.
4. Penilaian efektivitas difokuskan pada aspek kecepatan, akurasi, keterperincian laporan, dan kemampuan real-time sistem.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah aplikasi SIMONIBARJAS efektif dalam mendukung pelaporan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias?
2. Sejauh mana aplikasi SIMONIBARJAS mampu mengatasi permasalahan yang terdapat pada aplikasi AMEL, khususnya dalam hal kecepatan

pelaporan, akurasi data, keterperincian laporan, dan kemampuan sistem dalam menyediakan informasi secara real-time?

3. Bagaimana persepsi pengguna (pegawai pengelola pengadaan, operator, dan pejabat pengambil keputusan) terhadap kemudahan, kecepatan, dan akurasi dari aplikasi SIMONIBARJAS dibandingkan sistem sebelumnya (AMEL)?
4. Bagaimana peran aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung keberhasilan implementasi aplikasi SIMONIBARJAS?

1.5. Tujuan Proyek

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi aplikasi SIMONIBARJAS efektif dalam mendukung pelaporan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.
2. Untuk mengetahui aplikasi SIMONIBARJAS mampu mengatasi permasalahan yang terdapat pada aplikasi AMEL, khususnya dalam hal kecepatan pelaporan, akurasi data, keterperincian laporan, dan kemampuan sistem dalam menyediakan informasi secara real-time.
3. Untuk mengetahui persepsi pengguna (pegawai pengelola pengadaan, operator, dan pejabat pengambil keputusan) terhadap kemudahan, kecepatan, dan akurasi dari aplikasi SIMONIBARJAS dibandingkan sistem sebelumnya (AMEL)?
4. Untuk mengetahui peran aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung keberhasilan implementasi aplikasi SIMONIBARJAS?

1.6. Manfaat Proyek

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Menambah literatur akademik terkait implementasi sistem informasi dalam proses pelaporan pengadaan barang dan jasa, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah.

2. Memberikan dasar teoritis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas aplikasi pelaporan berbasis digital dalam konteks tata kelola pemerintahan.
3. Mengembangkan pemahaman akademik mengenai hubungan antara efektivitas pelaporan digital dan kualitas pengambilan keputusan dalam organisasi sektor publik.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias
 Hasil penelitian proyek ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam meningkatkan efektivitas sistem pelaporan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SIMONIBARJAS.
2. Bagi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
 Penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai perbaikan proses input, validasi data, serta koordinasi antar unit kerja untuk mendukung pelaporan yang lebih cepat, akurat, dan real-time.
3. Bagi Pengembang Aplikasi SIMONIBARJAS
 Penelitian ini dapat memberikan umpan balik terkait kelebihan dan kekurangan sistem, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan fitur dan peningkatan kualitas sistem ke depannya.
4. Bagi Pimpinan dan Pengambil Kebijakan
 Hasil penelitian proyek ini dapat membantu dalam memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan akurat dalam waktu yang cepat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan strategis di bidang pengadaan.